

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pemberitahuan otonomi daerah berakibat pada terlanjurnya dinamik perkembangan dan perbaikan sistem keuangan serta akuntansi di pemerintahan daerah menuju pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia yang diawali dengan keluarnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah membawa banyak perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan negara. Sejalan dengan itu, dalam kerangka otonomi daerah, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah.

Undang-undang tersebut merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya. Reformasi *sector public* yang disertai adanya tuntutan desentralisasi menjadi suatu fenomena global termasuk Indonesia. Desntralisasi melahirkan otonomi daerah yang bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan dan lebih mendekatkan fungsi pemerintah kepada masyarakat dan diharapkan mampu meningkatkan percepatan

pembangunan dalam usaha pencapaian tujuan negara yaitu masyarakat adil dan makmur

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 dan Nomor 33 Tahun 2004, membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggung jawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efektif dan efisien. Pemerintah daerah perlu melakukan penggolongan dana publik yang didasarkan pada konsep dasar *performance budgeting system* (anggaran kinerja). Sehubungan dengan hal tersebut maka penyelenggaraan pemerintah dipandang perlu untuk lebih menekankan prinsip-prinsip demokrasi diantaranya pemerataan keadilan dan memperhatikan potensi.

Anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi (Bastian,2006:171). Diterapkannya anggaran berbasis kinerja pemerintah berharap anggaran digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas manajemen sektor publik.

Anggaran merupakan salah satu bagian dari proses pengendalian manajemen yang berisi rencana tahunan yang dinyatakan secara kuantitatif, diukur dalam satuan moneter. Anggaran merupakan taksiran sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program kerja. Anggaran sangat penting dan relevan di Pemerintah daerah karena anggaran berdampak terhadap kinerja pemerintah yang dikaitkan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja diharapkan anggaran yang disusun oleh pemerintah dapat diwujudkan dengan baik

sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dengan kondisi jumlah anggaran dan realisasinya menunjukkan bahwa antara rencana anggaran yang ditetapkan dengan realisasi anggaran kegiatan terdapat ketercapaian.

Kinerja pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Pemerintah daerah sekarang ini dihadapkan oleh banyaknya tuntutan baik dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi eksternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki. Agar pemerintah daerah mampu menciptakan tujuan masyarakat daerah yang sejahtera sebagaimana suatu implikasi dari penerapan otonomi daerah yang mengedepankan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik.

Mardiasmo, (2009) menjelaskan aparatur juga merupakan salah satu fakta meningkatkan keefektifan organisasi menunjukkan kemampuan manajerial menjalankan fungsinya dan juga pengambilan keputusan. Kemampuan melakukan perencanaan, pengorganisaian, pengarahan, dan pengendalian dapat dijadikan sebagai indikator penilaian kinerja manajerial.

Berdasarkan artikel “Dewan Kecewa Proyek Trotoar Granit Tak Kunjung beres. Salah seorang anggota Komisi C DPRD Kota Bandung, Johnson Panjaitan, mengaku sangat kecewa dengan kinerja pelaksana proyek yang hingga jelang *deadline* kontrak masih belum juga bisa menyelesaikan pekerjaannya. Itu dikatakan Johnson terkait molornya pelaksanaan proyek *drainase* dan trotoar granit Jln. Braga dan L.L.R.E Martadinata. Politisi dari PDIP itu menuturkan,

hingga saat ini Komisi C sendiri belum menerima laporan dari dinas terkait perihal perkembangan proyek. Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kota Bandung masih belum menjelaskan secara rinci sudah sampai sejauh mana proyek berjalan. Sampai sekarang belum ada laporan berapa persen proyek sudah selesai. Mereka juga tidak bisa menjelaskan, proyek ini mulainya dari mana dan ujungnya di mana, sementara memang ada informasi yang menyebutkan jika proyek itu sudah dikerjakan hingga 80 persen. Namun, ia tidak begitu percaya angka itu jika melihat fakta yang ada di lapangan. Ia juga kembali menyatakan ketidakpuasannya terhadap kinerja pemborong dan DBMP Kota Bandung. Itu tak lepas dari tidak adanya informasi soal draft awal pelaksanaan proyek hingga dewan tidak bisa mengecek langsung sudah sampai mana proyek dilaksanakan. Kita tidak dapat draft awal, padahal ukuran kita dari sana. Kalau dapat draft awal, kita bisa ukur meskipun tidak tanya kiri kanan. Apakah progresnya memang sudah 70 atau 80 persen. Tapi dengan tidak adanya draft awal itu, kita juga bingung. Apalagi belum menerima laporan dari pihak terkait. Soal makin dekatnya batas waktu pelaksanaannya yang disebut-sebut tanggal 23 Desember ini, Johnson pun meminta Pemkot Bandung untuk bersikap tegas terhadap pemborong. Harus ada sanksi yang diberikan, terlebih jika masa perpanjangan diberikan, proyek tetap tak kunjung selesai. Seperti diketahui, Pemkot Bandung dibawah kepemimpinan Ridwan Kamil saat ini tengah merubah konsep trotoar di dua ruas jalan, L.L.R.E Martadinata dan Braga. Kedua ruas jalan itu trotoarnya diganti dengan batu granit import dari Tiongkok. Anggaran untuk pembangunan itu mencapai Rp 52 miliar dari APBD 2014 (www.galamedia.com).

Dengan adanya fenomena di atas, maka kinerja dari Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kota Bandung belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena dinas tersebut belum bisa menjelaskan secara rinci tentang proyek trotoar. Dengan tidak adanya transparansi laporan dan informasi draft awal proyek yang diterima oleh Dewan Komisi C, maka pelaksanaan proyek tersebut menjadi terhambat.

Komitmen organisasi adalah dorongan dari dalam individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan sendiri (weiner,2004:619). Komitmen organisasi yang menjadi tolak ukur sejauh mana aparat pemerintah daerah memihak pada suatu organisasi tertentu serta untuk mempertahankan keanggotaannya dalam suatu organisasi. Memberikan pekerjaan individu yang nilainya tidak selaras dengan nilai dalam organisasi yang ada, maka akan cenderung menghasilkan karyawan yang kurang memiliki motivasi dan komitmen, serta yang tidak terpuaskan oleh pekerjaan mereka dan organisasi yang kuat maka hal itu akan mempengaruhi aparat pemerintah daerah untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Selain mempengaruhi aparat pemerintah untuk bekerja keras mencapai dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Komitmen yang tinggi juga dapat menjadikan individu lebih mementingkan organisasi daripada kepentingan pribadinya dan berusaha untuk membentuk organisasi yang diharapkan.

Komitmen organisasi berkaitan dengan sikap seseorang yang berhubungan dengan organisasi tempat mereka bergabung. Sikap ini berkaitan dengan persepsi

tujuan organisasi dan keterlibatannya dalam melaksanakan kerja. Apabila komitmen organisasi itu rendah maka akan membuat individu berbuat untuk kepentingan pribadinya. Namun demikian dengan adanya komitmen organisasi yang tinggi maka secara tidak langsung juga akan meningkatkan kinerja tinggi pula. Komitmen organisasi merupakan merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian kinerja yang diharapkan (Nouri dan Paker.1996;dalam Sardjito,2007).

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan penulis di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Aparatur Pemerintah daerah sebagai pengemban amanat dari masyarakat harus bertanggung jawab atas kinerja yang telah dilakukannya, serta dituntut untuk melaksanakan akuntabilitas publik karena berkewajibannya mengelola dana masyarakat dalam rangka menjalankan pemerintahan dalam rangka pencapaian *good governance*, yaitu pemerintahan yang transparan, *value for money*, responsif dan akuntabel. Berdasarkan fenomena yang diuraikan diatas ada aparatur pemerintah yang kinerjanya kurang baik sehingga berdampak terhadap anggaran berbasis kinerja.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka perlu adanya ruang lingkup untuk mempermudah penjelasannya. Dengan penelitian ini penulis membuat batasan ruang lingkup atau merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas di Kota Bandung.
2. Bagaimana komitmen organisasi pada Dinas di Kota Bandung.
3. Bagaimana kinerja aparatur pemerintah pada Dinas di Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap komitmen organisasi pada Dinas di Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja aparatur pemerintah pada Dinas di Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh anggaran berbasis kinerja secara simultan terhadap kinerja aparatur pemerintah dan komitmen organisasi sebagai variabel intervening pada Dinas di Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas penulis mengidentifikasi tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas di Kota Bandung
2. Untuk menganalisis dan mengetahui komitmen organisasi pada Dinas di

Kota Bandung

3. Untuk menganalisis dan mengetahui kinerja aparatur pemerintah pada Dinas di Kota Bandung
4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap komitmen organisasi pada Dinas di Kota Bandung
5. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja aparatur pemerintah pada Dinas di Kota Bandung
6. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh anggaran berbasis kinerja secara simultan terhadap kinerja aparatur dan komitmen organisasi sebagai variabel intervening pada Dinas di Kota Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu secara praktis dan teoritis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penulis sangat berharap hasil dari penelitian yang dilakukan ini dapat berguna bagi dunia akuntansi khususnya dan disiplin ilmu lain pada umumnya. Serta penulis juga berharap semoga penerapan pendidikan dan latihan mendapatkan perhatian yang lebih besar dalam dunia pendidikan dikemudian hari.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini merupakan suatu hal yang dapat menimbulkan manfaat dan

berguna bagi penulis, Instansi, maupun bagi pembaca pada umumnya. Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

- a. Sebagai suatu pengalaman yang berharga karena penulis dapat memperoleh gambaran secara langsung mengenai teori-teori tentang anggaran berbasis kinerja, kinerja aparatur pemerintah dan partisipasi anggaran.
- b. Sebagai suatu sarana untuk menambah wawasan keilmuan, khususnya dalam menambah pengetahuan.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung.

2. Bagi Instansi

Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang berguna dan pertimbangan yang bermanfaat bagi pihak Instansi terkait untuk lebih mengetahui bagaimana pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja aparatur pemerintah dan partisipasi anggaran sebagai variabel intervening para pegawai/pejabat yang ada di lingkungan instansi pemerintah.

3. Bagi Pembaca

Bagi pembaca pada umumnya diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan dan sumber pemikiran yang bermanfaat dalam membangun bangsa ini lebih baik lagi untuk kedepannya melalui ilmu akuntansi.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini, Penulis melakukan penelitian pada Dinas-Dinas yang berada di kota Bandung. Adapun rencana waktu penelitian dimulai Bulan November 2015 sampai dengan selesai.